

PORTOFOLIO »

Proyek Tol Trans Sumatra tak Boleh Tunjuk Langsung

JAKARTA — Proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatra hendaknya tidak dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung. Direktur Pengembangan Centre for Informations Development Studies (Cides) yang juga dosen FISIP Universitas Nasional (Unas) Jakarta Hilmi R Ibrahim mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus menjaga komitmen pemerintah. Komitmen pemerintah hanya menggunakan

APBN untuk membangun infrastruktur dasar. Sedangkan untuk infrastruktur komersial diserahkan kepada swasta dalam bentuk *public private partnership* atau mekanisme lain.

"Jadi, komitmen ini harus dijaga betul," kata Hilmi di sela-sela diskusi bulanan Institute Public Trust (IPT) yang mengambil tema "Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Tanah Air dan Pemilu 2014", kemarin.

Hilmi menambahkan, salah

satu perpres yang harus dihentikan proses pembuatannya adalah perpres penunjukan langsung PT Hutama Karya (Persero) terkait pembangunan jalan tol Trans Sumatera.

Selain itu, ada juga perpres penunjukan langsung kontraktor pembangunan *mass rapid transport* (MRT) Jakarta. Perpres, kata Hilmi, bertentangan dengan kebijakan presiden beserta peraturan dan perundang-undangan. ■ antara ed: eh ismail